

ELIT DAN KEKUASAAN PADA MASYARAKAT DESA
Studi Relasi Antara Pemerintah dan Masyarakat di Desa Rias
Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kep. Bangka
Belitung

Khairul Amin, S.Sos

Mahasiswa Pasca Sarjana Sosiologi
Universitas Malikussaleh Lhokseumawe, Aceh

Abstract

This research is a field research that tries to describe and map social relation between society and government and how society participation to government itself. Data collected by observation, interview and document then analyzed with qualitative approach with analytical descriptive method. The results of this study indicate that the wheels government are still full of manipulation by a group of elites who with its power make society as the object of policy. The power of elite creates dominance where society does not have sufficient access to influence or feedback on government policy. This happens because the government doesn't use democratic means, or doesn't become a "father" for the people in organizing the government. The government is only an administrator rather than a leader so that relations and participation between the community and the government is a relationship of dominance, pseudo-participation, manipulative and co-optative. Public participation becomes negative and the deterioration of social relations is a manifestation of society's disillusionment with the elite (elite in power) and the reality is exacerbated by insensitivity and lack of government attention to the objective conditions of society.

Keywords: *Relation, Power, Elite, Government, Participation*

Abstrak

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang mencoba menjelaskan dan memetakan relasi sosial antara masyarakat dengan pemerintah desa serta bagaimana partisipasi masyarakat terhadap pemerintah itu sendiri. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumen kemudian dianalisis dengan pendekatan kualitatif dengan model deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan di desa masih sarat akan manipulasi oleh sekelompok elit tertentu yang dengan kekuasaannya menempatkan masyarakat sebagai objek dari kebijakan. Kekuasaan yang berada pada tangan elit ini melahirkan

dominasi sehingga masyarakat tidak mempunyai akses yang cukup untuk memberikan pengaruh ataupun umpan balik terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang sedang berlangsung. Hal tersebut terjadi karena kepala desa tidak lagi menggunakan cara demokratis, atau tidak lagi menjadi “bapak” bagi rakyatnya dalam menyelenggarakan pemerintahan. Pemerintah desa lebih menjadi administrator ketimbang menjadi pemimpin sehingga relasi dan partisipasi yang kemudian lahir antara masyarakat dengan pemerintah adalah relasi dominasi serta partisipasi semu, manipulatif dan kooptatif. Hilangnya partisipasi masyarakat dan memburuknya relasi sosial tersebut adalah manifestasi kekecewaan masyarakat terhadap para elit desa (elit berkuasa) dan kondisi itu diperparah oleh ketidakpekaan serta kurangnya perhatian pemerintah terhadap kondisi objektif masyarakatnya.

Kata Kunci: *Relasi, Kekuasaan, Elit, Pemerintah, Partisipasi*

Pendahuluan

Desa adalah salah satu bentuk dari kehidupan bersama, tinggal bersama-sama yang hampir semuanya saling mengenal dan kebanyakan dari mereka hidup dari pertanian, perkebunan dan lain-lain.¹ Pemilihan langsung Kepala Desa sebagai bentuk implementasi dari sistem demokrasi yang dianut oleh Indonesia berdampak pada munculnya elit-elit atau penguasa baru di pedesaan. Muncul aktor-aktor atau elit di desa turut menentukan arah kebijakan pemerintah serta menguasai sebagian besar sumber ekonomi yang ada di desa seperti; tuan tanah, lembaga-lembaga kooperatif, LSM, pemimpin agama, partai politik, aparat dan lain sebagainya².

Seperti halnya di Desa Rias³, sejak pergantian Kepala Desa yang dipilih secara langsung oleh masyarakat pada tahun 2008, mulai bermunculan berbagai persoalan dalam masyarakat. Program-program pemerintah Desa Rias sudah tidak berorientasi pada

¹ Hariadi B. Setiawan, *Arsitektur Lingkungan dan Perilaku*, Yogyakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1995. hlm. 51

² Willy R. Tjandra. *Praxis Good Governance*. (Yogyakarta : Pondok Edukasi. 2006., hlm.3

³Desa Rias merupakan salah satu daerah yang berada di Provinsi Bangka Belitung, yaitu di Kabupaten Bangka Selatan. Desa Rias merupakan daerah lumbung padi di Bangka Selatan karena sebagian besar masyarakatnya terjun kebidang pertanian, perkebunan dan sebagian lainnya sebagai Penambang Timah

pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana periode sebelumnya. Pada priode ini pembangunan hanya melibatkan sebagian kecil masyarakat dan hanya bermanfaat bagi sebagian kecil masyarakat terutama para elit desa yang memiliki akses dan informasi dengan pihak luar seperti kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan elit sosial lainnya.

Kepentingan para elit dalam rumusan kebijakan desa lebih menjadi prioritas dari pada kepentingan masyarakat, sehingga kebijakan-kebijakan baru yang dikeluarkan pemerintah desa mendapat respon negatif dari masyarakat. Misalnya pembangunan jembatan di depan rumah kepala desa menggunakan dana bantuan provinsi yang seharusnya dialokasikan untuk masyarakat malah digunakan untuk kepentingan pribadi. Pembangunan pasar desa yang hanya bisa ditempati oleh orang-orang yang mampu menyewa dengan harga yang tinggi dan akhirnya terbelengkalai tak terurus. Akibatnya kegiatan yang dilakukan pemerintah desa seperti pembersihan desa, gotong-royong, pembangunan infrastruktur desa tidak disambut hangat oleh masyarakat Desa Rias secara umum. Hanya kelompok-kelompok yang memiliki hubungan tertentu dengan pemerintah seperti karang taruna, BPD, anggota keluarga kepala desa serta beberapa aparat pemerintah lainnya yang menyambut baik kegiatan tersebut.

Persoalan-persoalan tersebut mengindikasikan bahwa relasi sosial yang terjalin di antara pemerintah dan masyarakat tidak berlangsung dengan baik. Relasi sosial dalam bentuk komunikasi sosial antara masyarakat dengan pemerintah seharusnya memberikan jalan untuk mencapai sebuah kesepakatan demi terciptanya suatu keteraturan dan kesejahteraan sosial dalam masyarakat. Kepentingan masyarakat yang seringkali terabaikan dan tidak terkomunikasikan dengan baik mengakibatkan konflik dan kesenjangan sosial selalu saja terjadi. Padahal Desa Rias sebagai desa lumbung padi Kabupaten Bangka Selatan, menuntut lahirnya kebijakan pemerintah desa yang lebih mendahulukan skala prioritas masyarakat bukan skala prioritas elit. Untuk itu Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana relasi masyarakat dengan pemerintah (elit desa) serta melihat partisipasi masyarakat terhadap program-program pemerintah Desa. Hal ini dilakukan untuk memahami mengapa realitas yang dikemukakan di atas terjadi di Desa.

Teori Elit

Menurut Pareto, setiap masyarakat diperintah oleh sekelompok kecil orang yang memiliki kualitas-kualitas yang diperlukan bagi kehadiran-kehadiran mereka pada kekuasaan politik yang penuh. Mereka bisa menjangkau pusat kekuasaan adalah mereka yang terbaik. Merekalah yang mampu menduduki kekuasaan tertinggi dalam lapisan masyarakat. Pareto juga percaya bahwa elit yang ada pada pekerjaan dan lapisan masyarakat yang berbeda itu pada dasarnya datang dari kelas yang sama yaitu orang-orang yang kaya juga pandai dan mempunyai kelebihan dari masyarakat kebanyakan. Karena itu menurut-nya, masyarakat terdiri dari dua kelas: *Pertama*, lapisan atas yaitu elit yang terbagi kedalam elit yang memerintah (*Governing Elit*) dan elit yang tidak memerintah (*Non-Governing Elit*) seperti tokoh agama, tokoh pemuda, tuan tanah dan lain sebagainya. *Kedua*, lapisan yang lebih rendah yaitu *non-elit* seperti masyarakat pada umumnya, petani dan lain sebagainya.⁴

Dalam kondisi tertentu, ada karakteristik yang membedakan antara elit satu dengan yang lainnya, yaitu kecakapan untuk memimpin dan menjalankan kontrol politik. Apabila kelompok elit yang sedang memimpin kehilangan kecakapannya, sedangkan orang-orang yang berada di luar kelompok tersebut menunjukkan kecakapannya dalam masyarakat, maka terdapat segala kemungkinan bahwa kelompok elit yang berkuasa saat itu akan dijatuhkan dan digantikan oleh kelas elit yang baru⁵. Artinya bahwa dalam kondisi tertentu posisi sekelompok elit juga dapat kehilangan kredibilitasnya dimata masyarakat sehingga dengan mudah dapat dijatuhkan oleh kelompok baru yang nantinya akan menjadi elit baru dalam masyarakat tersebut.

Robert Putnam⁶ mengatakan bahwa ada lima aspek yang berkaitan dengan elit dan kekuasaan politik yaitu; *Pertama*, kekuasaan politik seperti halnya barang-barang sosial lainnya yang didistribusikan dengan tidak merata. *Kedua*, pada hakikatnya orang dikelompokkan dalam dua kelompok, yaitu mereka yang memiliki kekuasaan politik penting dan mereka yang tidak memilikinya. *Ketiga*, secara internal, elit bersifat homogen, bersatu dan memiliki

⁴ Sp Varma, *Teori Politik Modern*, Jakarta:Rajawali Pers. 2010., hlm.200

⁵*Ibid.*, hlm.203

⁶ Syarifuddin Jurdi. *Islamisasi Or Politisasi Islam Di Bima*, Final Report Penelitian Kompetitif Individual: Depag RI. 2010., hlm.18-19

kesadaran. *Keempat*, elit mengatur sendiri kelangsungan hidupnya, kemudian keanggotaannya berasal dari suatu lapisan masyarakat yang terbatas. *Kelima*, kelompok elit pada hakikatnya bersifat otonom. Untuk memahami elit pada kondisi tertentu (pemerintahan desa) dan bagaimana suatu keputusan kolektif dalam suatu pemerintahan dilaksanakan secara bersama. Menurut Putnam setidaknya ada tiga model analisis elit yang dapat digunakan; *Pertama*, analisis posisional yang menempatkan elit berada dalam posisi struktural organisasi, mereka itulah yang paling banyak memberi andil dalam masyarakat. *Kedua*, analisis reputasional yang memposisikan elit sebagai orang yang mempunyai pengaruh atas keputusan-keputusan organisasi, meskipun ia tidak berada dalam struktur organisasi tersebut atau berada dalam posisi informal dalam masyarakat. *Ketiga*, ialah analisa keputusan yang memposisikan elit sebagai orang yang mempunyai pengaruh dalam organisasi sehingga ide-ide dan gagasan pemikirannya menjadi sumber referensi keputusan organisasi. Dengan kata lain, dalam hal ini elit diartikan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi proses pembuatan keputusan kolektif.⁷

Teori Partisipasi Masyarakat

Definisi partisipasi yang berlaku di kalangan perencana dan pelaksana pembangunan adalah kemauan rakyat untuk mendukung secara mutlak program-program pemerintah yang dirancang dan ditentukan tujuannya oleh pemerintah⁸. Definisi tersebut menunjukkan adanya subordinansi sistem oleh suprasistem dalam sebuah pemerintahan di mana dalam hal ini masyarakat pada dasarnya berada pada posisi yang subordinatif. Partisipasi yang kemudian muncul dalam proses dialektika antara masyarakat dan pemerintah menjadi semu, karena dalam hal ini masyarakat berada dalam posisi yang lemah. Artinya bahwa partisipasi terjadi karena adanya tekanan sari suprasistem yang menaungi masyarakat tersebut.

Dalam proses interaksi antara elit penguasa dan massa (rakyat) selain keberadaan penguasa (elit politik, elit agama, elit sosial) yang juga dipahami dengan kekuasaan massa merupakan elemen penting yang ikut menentukan perilaku politik elit maupun masyarakat itu

⁷ Robert D. Putnam dalam Syarifudin Jurdi.... *Ibid.*, hlm.20

⁸Loekman Soestrisno, *Menuju Masyarakat Partisipatif*. Yogyakarta : Kanisius, 1995., hlm.206

sendiri⁹. Soetomo mengatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan adalah keterlibatan nyata seluruh masyarakat dalam memikul beban pembangunan, bertanggungjawab atas pelaksanaan maupun meninjau kembali hasil-hasil pembangunan. Hal ini mengisyaratkan sangat diperlukannya sinergisitas yang kuat antara masyarakat dan pemerintah dalam ranah sosial maupun politik, sehingga bentuk partisipasi masyarakat dapat tercapai melalui proses dialektis antar keduanya.

Suatu masyarakat dalam menunjukkan partisipasinya dapat dianalisa dari sudut syarat-syarat fungsionalnya, yaitu: 1) Fungsi mempertahankan pola, fungsi ini berkaitan dengan hubungan antara masyarakat sebagai sistem sosial dengan subsistem kebudayaan. 2) Fungsi pencapaian tujuan yang menyangkut hubungan masyarakat sebagai sistem sosial dan subsistem aksi kepribadian. 3) Fungsi integrasi yang mencakup jaminan terhadap koordinasi yang diperlukan antara unit-unit dari suatu sistem sosial, khususnya yang berkaitan dengan kontribusi terhadap organisasi atau pemerintahan.

Fungsi-fungsi tersebut menyangkut penentuan tujuan-tujuan yang sangat penting bagi masyarakat dan mobilisasi warga untuk mencapai tujuan-tujuannya. Hal ini menyangkut penyesuaian masyarakat terhadap kondisi-kondisi dari lingkungan hidupnya. Jika beberapa fungsi tersebut ada yang tidak sesuai, maka akan terjadi sebuah ketimpangan, baik itu proses partisipasi masyarakat terhadap pemerintah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi maupun dalam ranah-ranah tertentu lainnya. Partisipasi berfungsi menumbuhkan kemampuan masyarakat untuk berkembang secara mandiri (*self-reliance*) dalam usaha memperbaiki taraf hidup masyarakat. Bila diterapkan dalam pembangunan, maka pendapat Keith Davis ini mengandung tiga unsur pokok, yaitu: (1) Adanya keterlibatan mental dan emosi individu dalam melakukan aktifitas kelompok. (2) Adanya motivasi individu untuk memberikan kontribusi tergerak yang dapat berwujud barang, jasa, buah pikiran, tenaga, dan keterampilan. (3) Timbulnya rasa tanggung jawab dalam diri individu terhadap aktivitas kelompok dalam usaha pencapaian tujuan.

Hubungannya dengan palaku-pelaku yang terlibat dalam aktifitas pembangunan, Nelson¹⁰ menyebutkan adanya dua macam

⁹ Sudjono Sastroadmojo, *Perilaku politik*. IKIP : Semarang Press. 1995., hlm.167

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 323

bentuk partisipasi, yaitu: (1). Partisipasi Horizontal yaitu partisipasi di antara sesama warga atau anggota masyarakat, di mana masyarakat mempunyai kemampuan berprakarsa dalam menyelesaikan secara bersama suatu kegiatan pembangunan; (2). Partisipasi Vertikal yaitu partisipasi antara masyarakat sebagai suatu keseluruhan dengan pemerintah, dalam hubungan dimana masyarakat berada pada posisi sebagai pengikut atau klien.

Pada masyarakat dewasa ini ada kaitan erat antara partisipasi dan insentif. Tanpa suatu insentif maka partisipasi yang akan terjadi sering berubah maknanya dari keinginan manusia untuk ikut secara sukarela dalam suatu kegiatan yang dianggap dapat memperbaiki taraf hidup masyarakat dan dirinya sendiri, menjadi suatu tindakan paksaan. Apabila partisipasi memperlakukan manusia sebagai tuan dari pembangunan maupun kebijakan, maka mobilisasi yang terjadi cenderung memperlakukan manusia sebagai objek pembangunan. Dengan kata lain, menganjurkan masyarakat berpartisipasi tanpa danya insentif sama artinya dengan menjadikan masyarakat sebagai tumbal pembangunan.¹¹

Ada tiga hal yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat¹²; *Pertama*, bahwa partisipasi masyarakat terhadap pemerintah maupun pembangunan bukanlah mobilisasi pembangunan. Partisipasi masyarakat terhadap pemerintah ataupun pembangunan adalah suatu proses kerjasama antara rakyat dan pemerintah dalam perencanaan dan pelaksanaan sebuah kebijakan maupun pembangunan. *Kedua*, untuk mengembangkan dan melembagakan partisipasi masyarakat, harus diciptakan suatu perubahan persepsi masyarakat terhadap pemerintah itu sendiri maupun terhadap pembangunan. *Ketiga*, untuk membangun partisipasi masyarakat, dibutuhkan toleransi aparat pemerintah terhadap kritik, pikiran alternatif yang muncul dalam masyarakat sebagai akibat dari dinamika pemerintahan itu sendiri. Kritik dan pikiran alternatif dari masyarakat merupakan suatu bentuk dari partisipasi masyarakat terhadap pemerintah itu sendiri.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskripsi berupa kata-kata tertulis

¹¹Loekman Soestrisno, *Menuju Masyarakat Partisipatif....Op.cit* hlm.215

¹²*Ibid.*, hlm.208

atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati¹³. Untuk itu, penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field study research*) yang bermaksud mempelajari secara intensif tentang latar belakang, keadaan sekarang, interaksi sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat¹⁴. Metode ini dipergunakan dengan pertimbangan akan semakin mempermudah peneliti apabila dalam penelitian ditemukan suatu kenyataan baru atau kenyataan ganda di lapangan. Kemudian dengan metode kualitatif, hubungan antara peneliti dengan informan akan lebih akrab dan lebih dekat, sehingga dapat memperoleh data langsung yang lebih mendalam karena penelitian kualitatif diartikan sama dengan penelitian nanturalistik¹⁵. Sekaligus dengan memakai metode ini peneliti dapat lebih peka dan lebih menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.

Sasaran utama dari penelitian ini adalah kelompok elit yang berkuasa di Desa Rias, elit agama, elit politik, elit birokrasi, dan elit-elit sosial serta masyarakat secara umum yang turut berpengaruh pada pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan wawancara sebagai sumber data primer dan data skunder berasal dari pustaka atau media massa yang relevan. Dalam pemilihan informan, penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu anggota sampel yang dipilih secara khusus berdasarkan tujuan Penelitian¹⁶. Bilamana dalam proses pengumpulan data sudah tidak lagi di temukan variasi informasi proses pengumpulan data ini dianggap sudah selesai¹⁷. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah pengolahan dan analisis data menggunakan metode *deskriptif analalisis*. Metode ini adalah metode analisis data yang menuturkan, menafsirkan serta mengklarifikasikan data-data atau informasi-

¹³ Lexy Maleong, *Metode Peneliteiten Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya. 2006. hlm.3

¹⁴ Husaini Usman, dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Peneliteiten Sosial*, Jakarta:

Bumi Aksara, 1996., hlm.5

¹⁵ Agus Salim, *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*. Yogyakarta : PT Tiara Wacana. 2001. hlm.13

¹⁶ Husaini Usman, dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996. hlm. 47

¹⁷ Burhan Bungin, *Analisis data penelitian kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2003. hlm..53

informasi yang berkaitan dengan obyek yang diteliti, kemudian dianalisis dengan membandingkan data-data tersebut dengan fenomena.¹⁸

Deskripsi Lokasi

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Rias. Desa Rias adalah salah satu desa dari 50 desa yang ada di Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kabupaten Bangka Selatan merupakan salah satu sentra penghasil beras di provinsi kepulauan Bangka Belitung yang dihasilkan dari Desa Rias. Selain itu desa rias juga dikenal sebagai wilayah penghasil timah dan hasil pertanian umum lain seperti beras, karet, lada dan sawit.

Desa Rias merupakan salah satu desa yang terluas di daerah Bangka Selatan dengan luas wilayahnya sekitar 52 Km² atau 5.000 Ha. Terdiri dari enam dusun yakni Dusun Rias, Dusun Sp.B, Dusun Sp.B, Dusun Sp.C, Dusun Sungai Gusung dan Dusun UPT. Bukit Anda. Jumlah penduduk Desa Rias pada tahun 2009/2010 sebesar 6.855 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk antara 5-10 orang perbulan, yang terdiri atas laki-laki sejumlah 3.646 dan 3.209 wanita dengan jumlah keluarga sebanyak 1.899 kepala keluarga.

Hasil dan Pembahasan

Elit dan Kekuasaan di Desa Rias

Golongan elit di Desa Rias sebetulnya muncul dari muara yang sama, yaitu pemerintah, agama dan “keberuntungan nasib”. Sedikit sekali dari mereka yang lahir dari pendidikan karena tingkat pendidikan masyarakat Desa Rias pun masih tergolong rendah. Kesadaran golongan elit Desa Rias selalu menempatkan masyarakat sebagaimana persepsi mereka sebagai seorang elit, bukan sebagai individu yang dipercaya oleh masyarakat untuk menyuarakan kepentingan mereka berdasarkan kondisi objektif pada masyarakat itu. Sehingga para elit itu secara terus menerus kehilangan kredibilitasnya di hadapan masyarakat Desa Rias. Salah satu penyebabnya adalah tidak transparannya sistem pemerintahan serta terjadinya proses sirkulasi elit yang berada di luar kontrol masyarakat. Proses sirkulasi elit terjadi dengan sangat cepat dan tanpa sepengetahuan masyarakat Desa Rias. Misalnya; pergantian

¹⁸ Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasan. 1998, hlm.. 104.

BPD, LSM, Karang Taruna, serta beberapa pejabat desa lainnya tidak diketahui dengan pasti oleh masyarakat¹⁹. Proses inilah yang kemudian mengantarkan kekuasaan kepada segelintir orang yang sebenarnya sudah tidak lagi dipandang sebagai tokoh penting oleh masyarakat Desa Rias.

Konfigurasi elit Desa Rias sebagaimana yang terekam dalam penelitian ini dapat di petakan berdasarkan peranannya menjadi empat kelompok,²⁰ *Pertama; Elit yang Paling Berkuasa*, mereka adalah sekelompok orang yang berasal dari kalangan pemerintah. Kekuasaan elit pertama ini didasarkan pada legitimasi struktural mereka adalah orang-orang yang secara struktural menempati posisi tertinggi dalam struktur pemerintahan. Posisi struktural tersebut menghantarkan elit pertama ini pada otoritas tertinggi di Desa Rias. Orang-orang yang berada dalam lingkaran elit ini adalah kepada desa, ketua BPD, ketua karang taruna dan beberapa orang yang secara struktural memiliki posisi ketua dalam struktur organisasi pemerintahan ataupun organisasi kemasyarakatan. Elit kategori pertama ini adalah orang-orang yang berkuasa karena kedudukannya.²¹ Eksistensi elit pertama ini dalam struktur sosial masyarakat Desa Rias memiliki peranan penting dalam menentukan arah kebijakan pemerintah, sehingga apa yang cenderung menjadi kepentingan mereka, itulah yang kemudian menjadi prioritas utama.

Kedua; Elit yang dikuasai, adalah sekelompok orang yang berada dalam struktur pemerintahan maupun struktur sosial masyarakat yang berafiliasi dengan kelompok penguasa. Kebanyakan mereka juga berasal dari kalangan birokrasi desa, tepatnya adalah aparat pemerintah yang ditunjuk langsung oleh kepala desa dan lembaga kemasyarakatan bentukan pemerintah seperti LPM, Karang

¹⁹ Hal ini terlihat jelas ketika peneliti bertanya kepada masyarakat umum terkait siapa ketua dan anggota BPD yang menjabat periode ini, kemudian ketua karang taruna, LSM, bahkan sampai kepada ketua RT mereka masing-masing, banyak dari mereka yang mengatakan tidak tahu sama sekali, jika tidak, mereka akan menyebutkan pejabat lama yang sudah tidak menjabat lagi. Kemudian jika ditanya siapa yang memilih mereka, masyarakat pun mengatakan tidak tahu. Hal ini jelas menunjukkan bahwa sirkulasi elit yang ada berada diluar kontrol masyarakat.

²⁰ Pengklasifikasian ini didasarkan pada hasil observasi dan wawancara kepada masyarakat dan elit yang ada Desa Rias selama penelitian ini berlangsung.

²¹ Galtung menyebutkan bahwa ada tiga sumber kekuasaan, salah satunya adalah kekuasaan yang diperoleh dari kedudukan struktural, lihat M. Nasrudin Anshoy. *Dekontruksi kekuasaan*. Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2008, hlm 14

Taruna, Kelompok Tani dan Organisasi pemuda. Kelompok ini ada juga yang berasal dari anggota masyarakat yang ingin ambil bagian dari kekuasaan,²² seperti tokoh agama, tokoh pemuda dan beberapa orang yang secara strata ekonomi lebih tinggi dari masyarakat kebanyakan.

Ketiga; Elit oposisi, kelompok yang satu ini adalah orang-orang yang sebenarnya merupakan golongan elit berpengaruh pada periode pemerintahan sebelumnya. Elit oposisi juga termasuk golongan orang-orang yang memiliki status ekonomi yang cukup baik. Dikatakan sebagai elit oposisi karena orang-orang yang tergolong dalam kelompok ini adalah orang-orang yang selalu mengkritik semua kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Kadangkala elit oposisi ini melakukan profokasi kepada masyarakat terkait perilaku sosial elit yang berkuasa dengan memberikan anggapan bahwa perilaku elit berkuasa tersebut tidak benar dan tidak sesuai dengan budaya masyarakat setempat. Lingkaran elit oposisi dihuni oleh orang-orang yang berada pada "barisan sakit hati" yang kalah bertarung dalam kontestasi politik di Desa Rias pada tahun 2008. Elit tersebut tidak mendapatkan posisi dalam kekuasaan seperti mantan calon Kades, mantan aparat pemerintah, mantan anggota BPD dan beberapa anggota masyarakat yang sempat "mendapat berkah" kekuasaan dari pemerintahan periode sebelumnya sedangkan pada periode ini mereka disingkirkan. Keberadaan elit ketiga ini secara signifikan berpengaruh karena tindakan mereka sudah cukup memberikan perubahan pada cara pandang masyarakat terhadap pemerintah yang sedang berkuasa di Desa Rias. Hal itu terjadi karena orang-orang yang ada dalam golongan elit ini mampu melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan cukup baik²³.

²² Maksudnya, kelompok ini adalah anggota masyarakat yang sebetulnya adalah orang-orang yang dahulu memiliki pengaruh dalam masyarakat yang kemudian secara sepihak ditunjuk oleh pemerintah sebagai tokoh agama, tokoh pemuda dls, yang dalam setiap kegiatan pemerintahan mereka dilibatkan sebagai wakil dari masyarakat. Padahal masyarakat sendiri sudah tidak menganggap orang-orang yang di sebut oleh pemerintah "tokoh" itu sebagai tokoh bagi mereka dan layak menjadi wakil mereka.

²³ Kelompok elite oposisi ini adalah orang-orang yang rajin dan senang mendengar keluhan-keluhan dari masyarakat. Mereka selalu menghadiri acara-acara sosial dan acara-acara keagamaan yang diadakan oleh warga. Bahkan tak jarang, masyarakat yang ikut kecewa terhadap pemerintah desa yang ada saat ini, menjadikan mereka sebagai figur yang layak untuk dimintai pendapat dan

Keempat; Elit netral, kelompok elit yang terakhir ini adalah golongan yang terbanyak dari keempat kelompok elit yang ada di Desa Rias. Elit netral adalah orang-orang yang secara sosio-politik berada pada ranah yang netral dan kelompok elit inilah yang bergerak di ranah kultural masyarakat Desa Rias. Perannya pun cukup signifikan, tetapi hanya dalam konteks kehidupan sosial masyarakat. Orang-orang yang berada dalam kelompok elit netral tidak terlibat secara intensif dalam persoalan-persoalan politik, terutama pada persoalan kekuasaan melainkan hanya jadi pengamat saja tanpa kemudian memberikan komentar apapun terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah desa. Kecenderungan kategori netral hanya sebatas pembentukan penormalan nilai-nilai sosial yang ada dalam masyarakat.

Keempat kelompok elit tersebut di atas secara signifikan telah memberikan kontribusi pada perubahan pola pikir ataupun cara pandang masyarakat Desa Rias terhadap fenomena kekuasaan tingkat desa. Masyarakat Desa Rias yang sebelumnya sangat permisif terhadap perilaku elit, kini menjadi cenderung pragmatis bahkan menuju keranah apatisisme masyarakat terhadap eksistensi elit berkuasa itu. Perilaku elit seringkali menjadi bahan *dagelan* masyarakat dalam setiap obrolan ringan di berbagai acara kemasyarakatan²⁴.

Polarisasi Kepentingan Elit Desa Rias

Citra kepala desa yang *benevolent*²⁵ atau sebagai wali yang menganggap dirinya dipercaya dan disertai mandat penuh oleh masyarakat telah membuat Kepala desa merasa tidak perlu bertele-tele bekerja dengan semangat partisipatif dan transparansi. Apalagi harus mempertanggungjawabkan semua tindakan dan kebijakannya di hadapan publik atau masyarakat. Sebaliknya, karena rasa kecewa, masyarakat Desa Rias menjadi tidak terlalu peduli dengan kinerja kepala desa sejauh tidak mengganggu perut dan nyawa warganya secara langsung.

pandangan-pandangannya terkait persoalan-persoalan yang muncul dalam masyarakat dari pada kepada pemerintah yang sedang berkuasa.

²⁴ Pada acara keagamaan seperti yasinan di tempat orang meninggal misalnya, perilaku sosial elit menjadi perbincangan disela-sela acara tersebut. Mereka membicarakan para aparat pemerintah yang dari segi perilaku hingga kebijakan yang diambil oleh para elit tersebut.

²⁵ Sutoro Eko, dkk. *Pembaharuan Pemerintahan Desa*. Yogyakarta: IRE Press, 2003

Kebijakan pemerintah desa yang berhubungan langsung dengan masyarakat baik itu pembangunan, ekonomi, politik dan sosial, terlalu di dominas oleh kepala desa. Salah seorang elit mengatakan “semua usulan terkait pembangunan kami sampaikan, tetapi semua tergantung kepala desa mana yang menurut dia penting, maka itu yang menjadi kebijakan pemerintah²⁶”. Kondisi ini secara tidak langsung telah melahirkan kekecewaan dikalangan elit itu sendiri, sehingga tanpa sepengetahuan kepala desa, para elit ini seakan membangun kekuatan antar sesama kelompok elit itu sendiri untuk kemudian *mencounter* kebijakan yang dominatif tersebut.

Selain itu, pembangunan yang tidak merata di beberapa dusun, mendapat penilaian masyarakat sebagai sesuatu yang deskriminatif sehingga elit yang mewakili dusun mendapat sorotan dari masyarakat terkait pembangunan yang tidak mereata tersebut. Akibatnya, beberapa elit merasa gerah dengan sorotan masyarakat sehingga dengan sekuat tenaga ia berusaha memperjuangkan kepentingan masyarakat dusunnya tersebut. Tetapi, akibat kekuasaan yang dimiliki oleh kepala desa yang bergitu kuat dominasinya teradap para elit dusun yang ada di Desa Rias, membuat usaha-usaha yang demikian itu tak berarti apa-apa karena keputusan akhir tetap berada di bawah kuasa kepala desa.

Fenomena lain yang terkait dengan polarisasi kepentingan elit di Desa Rias adalah berkenaan dengan afiliasi para elit itu dengan partai politik. Fenomena ini merupakan fakta yang paling nampak dan paling mudah diamati terkait polarisasi kepentingan para elit yang ada di Desa Rias. Afiliasi para elit dengan beberapa partai politik telah membuat hubungan para elit ini menjadi tidak harmonis. Banyak fakta yang ditemukan dilapangan terkait hal ini, salah satunya yang terjadi pada proses pemilihan bupati Bangka Selatan. Terjadi perpecahan antara elit penguasa dengan beberapa elit oposisi dalam memberikan dukungan terhadap calon bupati di Bangka Selatan. Intrik-intrik sentimen terjadi bergitu kental, elit penguasa cenderung memaksakan kehendaknya untuk mengarahkan masyarakat untuk memilih calon yang di *jagokannya*. Kondisi ini kemudian melahirkan konflik di tingkatan elit itu sendiri, karena masing-masing dari mereka mendapatkan dukungan yang berbeda baik itu dari masyarakat maupun dari elit pemerintah kabupaten.

²⁶ Wawancara dengan salah satu elit desa yang berasal dari dusun Sp.B pada tanggal 5 September 2011

Polarisasi kepentingan elit yang ada di Desa Rias secara garis besar selalu berhubungan dengan sejauh mana kepentingan individu para elit itu sendiri serta bagaimana cara mereka merealisasikannya. Inilah yang kemudian disebut oleh Laswell bahwa politik itu selalu berkenaan dengan *who get what, wen and how*.²⁷ Kurangnya kesadaran para elit itu atas tanggung jawab sosial mereka kepada masyarakat membuat pertarungan kepentingan itu menjadi sesuatu yang cukup memperhatikan. Konteks ini jelas menunjukkan bahwa kepentingan masyarakat desa yang seharusnya menjadi prioritas mereka menjadi sangat terabaikan.

Relasi antara Masyarakat dan Pemerintah

Sebagai miniatur negara, Desa Rias menjadi salah satu arena politik paling dekat bagi relasi antara masyarakat dengan pemegang kekuasaan (perangkat desa dan elit desa). Para perangkat desa menjadi bagian dari birokrasi negara yang mempunyai segudang tugas kenegaraan, yaitu menjalankan birokratisasi di level desa, melaksanakan program-program pembangunan, memberikan pelayanan administratif kepada masyarakat, serta melakukan kontrol dan mobilisasi warga desa. Selain kelompok kecil elit, pemerintah desa sebagai institusi negara juga memiliki peran sentral dalam kehidupan sosial masyarakat, pemerintah memiliki segudang kekuasaan yang dapat dipergunakan untuk kesejahteraan masyarakat yang dipimpinnya. Sastroadmojo mengatakan bahwa dalam proses interaksi antara elit penguasa dan massa (rakyat) selain keberadaan penguasa yang juga dipahami dengan kekuasaan massa yang merupakan elemen penting dalam ikut menentukan perilaku politik elit maupun masyarakat itu sendiri.²⁸

Iklim demokrasi yang sedang berkembang dalam sistem politik Indonesia dewasa ini telah membuka berbagai kemungkinan bagi peningkatan keterlibatan warga dalam berbagai proses pengambilan kebijakan publik di level desa. Pemahaman semacam ini berkembang dengan baik dalam struktur kekuasaan di Desa Rias, para elit berkuasa memiliki obsesi yang tinggi agar ada keterlibatan warga yang lebih luas. Tetapi keinginan tersebut tidak berjalan paralel dengan orientasi kebijakan elit berkuasa di Desa Rias. Produk

²⁷ Mariam Budiarto, *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003. hlm 20

²⁸ Sudjono Sastroadmojo, *Perilaku politik*, IKIP : Semarang Press. 1995., hlm 167

kebijakan pemerintah tetap saja menafikan kehendak dan kondisi obyektif masyarakat Desa Rias. Karena bagi para pemangku birokrasi di Desa Rias sendiri, pengetahuan mereka hanya sebatas bagaimana menjalankan tugas sesuai dengan diperintahkan oleh kepala desa dalam kapasitas dan jabatan mereka memerintah. Fenomena tersebut bermuara pada pola kepemimpinan kepala desa yang cenderung otoriter dan semaunya sendiri tanpa memperhatikan kondisi masyarakat secara obyektif serta kecenderungannya yang tidak mengindahkan aspirasi-aspirasi yang lahir dari masyarakat. Di sisi lain masyarakat menyadari bahwa apa yang dilakukan oleh para elit yang ada di institusi pemerintahan desa itu tidak sepenuhnya memperjuangkan kesejahteraan masyarakat melainkan kesejahteraan individunya. Kekuasaan elit di Desa Rias telah berhasil mencengkram penduduk desa dengan menempatkan kepala desa sebagai individu yang sangat berkuasa secara mutlak atas keputusan-keputusan yang berkaitan dengan urusan publik. Masyarakat hanya menjadi penonton tanpa diberi kesempatan untuk memberikan umpan balik terhadap kebijakan-kebijakan tersebut.

Secara moral etik, fungsi pemerintah adalah sebagai pelayan dan pemimpin yang mengatas namakan masyarakat dalam setiap tindakannya bukan semata-mata apa yang mereka pikirkan atas nama rakyat yang direduksi secara personal, terlebih hanya mementingkan urusan pribadinya.²⁹ Namun yang terjadi di Desa Rias, para pemangku kekuasaan cenderung mereduksi semua aspek yang terkait dengan masyarakat secara personal, dan hal ini menjangkiti semua elemen pemerintahan. Di samping itu, sistem pemerintahan yang berlandaskan patron-klient atau patrimonial³⁰ juga menjadi semacam penyakit yang mendarah-daging pada corak berpikiti elit Desa Rias yang sukar untuk disembuhkan. Salah satu penyebabnya adalah ketidappahaman mereka yang menjadi pemimpin atau elit terkait sistem pemerintahan ataupun tujuan dari dibentuknya lembaga pemerintahan itu. Para elit pun tidak sepenuhnya mengerti dengan cara-cara yang demokratis dalam menjalankan pemerintahannya, sehingga bentuk-bentuk pelayanan publik yang

²⁹ Lihat, Munir Mul Khan, *Moral Politik Santri*. Jakarta: Erlangga, 2003., hlm 80

³⁰ Kekuasaan di Desa Rias dikatakan partimomial karena terjadi konsep hierarki atas dan bawah dalam sistem pemerintahannya, di mana pejabat hierarki bawah (elit yang dikuasai) tidak berani melawan atau menolak pemerintah dari hierarki atas (kepala desa). Untuk lebih jelas mengenai konsep hierarki atas dan bawah. Lihat, Miftah Thoha, *Birokrasi dan Politik di Indonesia*. hlm 7

lahir hanya berhenti pada tingkatan prosedural saja. Sedangkan secara substansial, pelayanan publik masih bersifat pragmatis di mana pelayanan diberikan oleh pemerintah kepada masyarakatnya masih menempatkan masyarakat sebagai pihak yang sepenuhnya membutuhkan dan pemerintah memberikan pelayanan layaknya penguasa.

Partisipasi Publik dan Birokratisme Pembangunan Di Desa Rias

Secara teoritis, partisipasi adalah keterlibatan secara terbuka (*inclusion*) dan keikutsertaan (*involvement*). Keduanya mengandung kesamaan tetapi berbeda titik tekannya. *Inclusion* menyangkut siapa saja yang terlibat, sedangkan *involvement* berbicara tentang bagaimana masyarakat terlibat.³¹ Keterlibatan berarti memberi ruang bagi siapa saja untuk terlibat dalam proses politik, terutama kelompok-kelompok masyarakat miskin, minoritas, rakyat kecil, perempuan, dan kelompok-kelompok marginal lainnya.

Secara substantif partisipasi mencakup tiga hal;³² *pertama*, *voice* (suara); di mana setiap warga mempunyai hak dan ruang untuk menyampaikan suaranya dalam proses pemerintahan. Sebaliknya, pemerintah mengakomodasi setiap suara yang berkembang dalam masyarakat yang kemudian dijadikan sebagai basis pembuatan keputusan. *Kedua*, akses; yakni setiap warga mempunyai kesempatan untuk mengakses atau mempengaruhi pembuatan kebijakan, termasuk akses dalam layanan publik. *Ketiga*, kontrol; yakni setiap warga atau elemen-elemen masyarakat mempunyai kesempatan dan hak untuk melakukan pengawasan (kontrol) terhadap jalannya pemerintahan maupun pengelolaan kebijakan dan keuangan pemerintah. Dalam pengertian tersebut jelas bahwa partisipasi mensyaratkan hubungan yang baik antara masyarakat dan pemerintah. Namun jika hubungan baik itu tidak terlaksana maka mustahil akan tercipta sebuah partisipasi yang baik.

Di atas kertas, Indonesia sebagaimana Desa Rias mengenal perencanaan pembangunan dari bawah yang dimulai dari forum RT,

³¹ Deepa Narayan, et. al, *Empowerment and Poverty Reduction: A Sourcebook*. Washington D.C: PREM World Bank, 2002, dalam Sutoro Eko, *Ekonomi Politik Pembaharuan Desa*, Makalah disajikan dalam Pertemuan Forum VII, "Refleksi Arah dan Gerakan Partisipasi dan Pembaharuan Masyarakat Desa di Indonesia", yang digelar Forum Pengembangan Partisipasi Masyarakat (FPPM), Ngawi, Jawa Timur, 15-18 Juni 2003. hlm.17

³² *Ibid.*, hlm 12

Musrimbangdus dan Musrimbangdes sebagai mediator untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Tetapi kenyataannya, alur perencanaan dari bawah ini tidak otentik dan tidak bermakna partisipatif karena sarat dengan manipulasi yang akhirnya semua agenda pembangunan dirumuskan menurut preferensi kepala desa serta beberapa elit yang berkepentingan atas kesepakatan itu. Inilah yang kemudian menjadi alasan melemahnya partisipasi masyarakat di Desa Rias. Meskipun ada musrimbangdus dan musrimbangdes, namun itu tidak cukup mampu untuk menempatkan masyarakat sebagai subyek kebijakan. Pembangunan dari tingkatan RT hingga ketinggian desa karena hal yang demikian itu hanya bersifat prosedural saja. Secara substansial proses hingga hasil dari musrimbang itu masih didominasi oleh sekelompok kecil elit yang berkepentingan dan sarat dengan manipulasi dari kalangan elit itu sehingga masyarakat dalam hal ini berada dalam kondisi *inferior*. Lemahnya praktik-praktik demokrasi di Desa Rias tersebut dibungkus oleh kalangan elit dalam kultur dan struktur kekuasaan desa yang paternalistik-klientelistik. Kultur kekuasaan yang menganggap kepala desa sebagai pemangku kekuasaan tertinggi dalam menentukan arah kebijakan melekat betul pada kalangan elit pemerintah Desa Rias³³. Pemerintah desa yang mengelola kekuasaan dan kekayaan dalam bingkai birokratisasi pemerintahan justru menyebabkan pergeseran makna pemerintah desa yang pada periode sebelumnya dianggap cukup populis dan egaliter menjadi perangkat desa yang birokratis. Pada sisi lain masyarakat Desa Rias tidak mempunyai ruang yang cukup dan kapasitas untuk *voice* dan *exit* dari kondisi struktural desa yang bias elite, sentralistik dan feodal itu.

Oleh karena itu, merupakan suatu yang wajar apabila kemudian masyarakat Desa Rias tidak memberikan simpati yang baik kepada pemerintah desa. Sikap acuh dari masyarakat, ketidakpatuhan terhadap seperangkat aturan yang dibelakukan oleh pemerintah setidaknya menjadi salah satu bukti hilangnya rasa simpati masyarakat terhadap pemerintah desa. Selain itu, tidak tersedianya ruang publik yang memadai bagi masyarakat untuk memberikan umpan balik terhadap semua kebijakan juga turut menyumbang hilangnya partisipasi masyarakat. Kondisi ini memaksa pemerintah

³³Semua perangkat desa saat diwawancarai menyatakan bahwa kepala desa-lah yang paling berkuasa di desa sehingga mereka selalu menuruti semua keputusan kepala desa itu.

memobilisasi partisipasi masyarakat, sehingga terciptalah kemudian sebuah partisipasi semu ditingkatkan masyarakat Desa Rias. Padahal secara teoritis, ruang publik sebenarnya mampu menjembatani ruang antara masyarakat dan pemerintah, karena ruang publik dapat melahirkan masyarakat yang bebas dominasi sebagai hasil pencapaian konsensus. Tetapi jika ruang publik yang diharapkan itu ternyata masih belum bebas dari dominasi kalangan elit, nampaknya hal itupun akan sulit untuk dicapai.

Kesimpulan

Demokrasi yang melahirkan pilihan pada sistem perwakilan dan pemilihan langsung menyebabkan munculnya elit-elit tertentu yang memperkuat kecenderungan pola demokrasi elitis ditingkatkan pedesaan. Demokrasi elitis di Desa Rias menegaskan relaitas bahwa disetiap masyarakat, pihak-pihak tertentu hasil pilihan mayoritas membuat keputusan-keputusan besar yang terkadang bertentangan dengan kondisi objektif masyarakat. Dalam konteks ini, oligarki kekuasaan bermetamorfosa dalam bentuk baru dan senantiasa hadir sebagai sesuatu yang “menyeramkan” di tengah masyarakat.

Elit pemerintah tidak memahami bahwa hakikat kedaulatan dan kekuasaan identik dengan sesivitas perasaan masyarakat mengakibatkan praktek demokratisasi sama sekali tak terlihat. Elit pemerintah ternyata hanya mendasarkan prefensi kebijakan publik berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang politis yang berujung pada manifestasi kebijakan yang jauh dari harapan masyarakat. Pola pikir feodal dalam pemerintah yang semata menganggap pemerintahan dengan kemutlakan dan absolusitas menempatkan dirinya sebagai subjek pembangunan, sedang masyarakat adalah objek semakin memperparah praktek demokrasi ditingkatkan pedesaan saat ini.

Elit dan kekuasaan di Desa Rias masih berada pada struktur kekuasaan yang dominatif di mana masyarakat tidak mempunyai akses yang cukup untuk memberikan pengaruh terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Kepala desa tidak lagi menggunakan cara demokratis, atau tidak lagi menjadi “bapak” bagi masyarakat dalam menyelenggarakan pemerintahan tersebut. Kepala desa lebih menjadi administrator dari pada menjadi pemimpin. Sehingga relasi dan partisipasi yang kemudian lahir dari masyarakat terhadap pemerintah beserta program-programnya hanya sebatas partisipasi semu. Hal itu juga dilatar belakangi oleh pola kepemimpinan yang di

perlihatkan pemerintah desa merupakan bentuk kepemimpinan otoriter. Tidak ada ruang partisipasi dan ruang publik bagi masyarakat, pengambilan kebijakan tidak didasarkan pada aspirasi masyarakat serta hilangnya fungsi kontrol BPD dalam struktur kekuasaan menjadi indikator yang menunjukkan pola pemerintahan otoriter tersebut. Selain itu, masuknya partai-partai politik ke Desa Rias menyebabkan berubahnya struktur kekuasaan desa di mana kepala desa dalam hal ini lebih menjadi representasi dari kepentingan golongan tertentu ketimbang masyarakat yang dipimpinnya.

Hilangnya partisipasi masyarakat dan memburuknya relasi sosial antara pemerintah dengan masyarakat di Desa Rias adalah manifestasi kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah. Kekuasaan di tangan kepala desa dan para elit telah menempatkan masyarakat dalam posisi yang inferior, meskipun para elit tersebut sebetulnya bukan orang-orang yang diharapkan oleh masyarakat. Kondisi tersebut diperparah dengan ketidakpekaan serta kurang perhatian pemerintah terhadap kondisi objektif masyarakat. Akibatnya, Partisipasi yang kemudian lahir dari masyarakat bukanlah suatu bentuk partisipasi yang positif dalam artian mendukung kinerja aparat pemerintah, tetapi pragmatis terhadap pemerintah maupun terhadap elit yang berkuasa.

Untuk itu dibutuhkan transparansi dan akuntabilitas terkait penyelenggaraan pemerintahan desa serta "niat yang baik" dari elit dan pemerintah untuk benar-benar menjalankan roda pemerintahan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Karena niatan yang baik dari pemangku kekuasaan merupakan aspek penting untuk menuju masyarakat yang partisipatif dan sejahtera. Selain itu, responsivitas atau daya tanggap pemerintah desa terhadap fenomena sosial dalam masyarakat harus ditampakkan. Elit Pemerintah harus mampu dan tanggap terhadap aspirasi maupun kebutuhan masyarakat dan menjadikannya sebagai preferensi utama pengambilan keputusan di desa. Responsif bukan hanya berarti elit desa selalu siap-sedia memberikan uluran tangan ketika warga masyarakat membutuhkan bantuan dan pelayanan. Responsif berarti melakukan artikulasi terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat, yang kemudian mengolahnya menjadi prioritas kebutuhan dan memformulasikannya menjadi kebijakan desa. Dan yang juga tidak kalah penting lembaga-lembaga sosial dan politik yang ada di Desa harus kembali pada fungsi pokoknya sebagai wadah aspirasi bagi masyarakat dan sekaligus sebagai pengontrol penyelenggaraan pemerintahan desa.

Daftar Pustaka

- Abdulsyani, 2007. *Sosiologi Skematika, Teori dan Penerapannya*. Jakarta : Bumi Aksara
- Anshoy, M. Nasrudin, 2008. *Dekontruksi kekuasaan*. Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara
- Arikunto, Suharsini, 1998. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan*, Jakarta: Rineka Cipta
- Budiarjo, Mariam, 2003. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Burhan, bungin, 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Eko, Sutoro, dkk. 2003. *Pembaharuan Pemerintahan Desa*. Yogyakarta: IRE Press
- Hamzah, Fahri, 2010. *Negara, Pasar dan Rakyat*. Jakarta: Faham Indonesia
- Haryanto, Ariel, dkk. 1996. *Bahasa dan kekuasaan*. Bandung: Mizan
- Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, 1996. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Irtanto, 2008. *Dinamika Politik Lokal Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Jurdi, Syarifuddin, 2010. *Islamisasi Or Politisasi Islam Di Bima*, Final Report Penelitian Kompetitif Individual: Depag RI
- , 2008. *Pemikiran Politik Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Keller, Suzanne, 1984. *Penguasa dan Kelompok Elit*. Jakarta: Rajawali
- Koentjaraningrat, 1989. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia.
- Leibo, Jefta. *Sosiologi Pedasaan (Mencari Sebuah Strategi Pembangunan Masyarakat Berparadigma Ganda)*. Yogyakarta : Andi Offset.
- Lexy, J. Maleong, 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya
- Mardalis, 2003. *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara
- Muhadjir, Noeng. 1998. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasan
- Mulkhan, Munir, 2001. *Kiai presiden, Islam dan TNI: di Tahun-Tahun Penentuan*. Yogyakarta: UII Press
- , 2003. *Moral Politik Santri*. Jakarta: Erlangga

- Nasution, 2004. *Metode Research Penelitian*, Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Patilimia, Hamid, 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Alfabeta
- Qodir, Zuly. 2002. *Agama dan Etos Dagang*, Yogyakarta : Amanah
- Salim, Agus, 2001. *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Tiara Wacana
- Setiawan, Hariadi . 1995. *Arsitektur Lingkungan dan Perilaku*. Yogyakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI
- Soekanto, Soerjono. 1982. *Memperkenalkan Sosiologi*. Jakarta: CV. Rajawali
- ,1984. *Beberapa Teori Sosiologi Tentang Struktur Masyarakat*. Jakarta: CV Rajawali.
- Soestrisno, Loekman. 1995. *Menuju Masyarakat Partisipatif*. Yogyakarta: Kanisius,
- Subarsono. 2008. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Sastroadmojho, Sudjono, 1995. *Perilaku politik*. IKIP : Semarang Press
- Susan, Novri M.A. 2009. *Sosiologi Konflik Dan Isu-Isu Konflik Kontemporer*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Seligman, Lester G dkk, 1989. *Elit dan Modernisasi*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2005. *Manajemen Publik*. Jakarta: Gramedia
- Thoha, Miftah, 2003. *Birokrasi dan Politik di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press
- Tjandra, Willy R. 2006. *Praxis good governance*. Yogyakarta: Pondok Edukasi
- Varma, Sp, 2010. *Teori Politik Modern*. Jakarta: Rajawali Pers